

Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

Determinan Pembangunan Rumah di Kabupaten Merauke
Fenti J. Manuhutu

Analisis Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari
Hans Sammy M. Salakory

**Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan (Rasio Efektivitas dan Rasio Kemandirian) Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Manokwari**
Febby S. Matulesy

**Pengaruh Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Semangat Kerja Karyawan
Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Ambon**
Ventje Jeffry Kuhuparuw

**Analisa Pengaruh Konflik Peran dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada
PT. Bank Central Asia Cabang Utama Ambon**
Novalien C. Lewaherilla

**Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan
Pembelian Semen Tonasa Di Kota Ambon**
Maudy Marla Tanihattu

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Maluku
Asmaria Latuconsina

**Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bank Swasta
di Kota Ambon**
Sherly Rutumalessy

**Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan
Kemiskinan di Maluku Utara: Pendekatan Model CGE**
Amran Husen

**Bauran Pemasaran Jasa : Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon**
Imelda Talahatu

**Transformasi dan Reposisi Praktek Sumber Daya Manusia
Dalam Mencapai Keunggulan Kompetitif**
Roy Alan Wattimena

**Pinjaman Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan dan
Variabel-Variabel Makro Ekonomi yang Mempengaruhinya
di Kota Ambon**
Yerimias Manuhutu
Desry Jonelda Louhenapessy



PINJAMAN DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAN VARIABEL-VARIABEL MAKRO EKONOMI YANG MEMPENGARUHINYA DI KOTA AMBON

Yerimias Manuhutu

Desry J. Louhenapessy

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon

ABSTRACT

Aim of this study is to find the financial ability and analyze government loan as an alternative and macro economic variables in Ambon City. Data used in this research is secondary data with length of time 2007-2011. Research method that used in this study are Debt Service Coverage Ratio (DSCR), maximum limit of loan that acceptable and ordinary least square (OLS) to figure out the affecting of macro economic variables throught government loan.

The result of this research shows that local government of Ambon City has a strenght in monetary ability to purpose the loan. Could be seen in the result of average DSCR value 7.48. City of Ambon could make a larger value of a loan because the result shows that the boundary value is Rp 439.646,79 billion and in 2011 Ambon City using the capability about 14 percent so the number could be more incresingly. With OLS method the result is X_1 (money velocity) variable is significant and has a positive direction and X_2 (interest rate) variable is significant but has a negative direction with government loan. Meannwhile X_3 (inflation rate) variable is not significant affecting government loan.

Keywords: *Government loan and macro economic variables*

I. PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka daerah-daerah akan memperoleh perimbangan keuangan yang adil, sehingga pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, yang jauh lebih penting dipersiapkan oleh setiap daerah bukanlah menghitung berapa tambahan penerimaan daerah setelah otonomi daerah terlaksana tetapi memastikan dapat disusunnya perencanaan yang mantap dan menyeluruh dalam pemanfaatan dana pembangunan.

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan. Tanpa pelimpahan keuangan, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lain-lain yang sah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah adalah pinjaman daerah.

Semakin pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilitasi yang semakin besar sehingga untuk menutupi kekurangan sumber pembiayaan maka pemerintah daerah diberikan kewenangan atau dimungkinkan untuk melakukan pinjaman.

Penggunaan dana pinjaman sebagai salah satu pilihan pembiayaan pembangunan memegang peranan penting dalam membuka peluang investasi dan membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Pinjaman daerah merupakan salah satu instrument pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik. Pada prinsipnya, pinjaman daerah terjadi karena APBD mengalami defisit. Dalam teori pengelolaan keuangan, kita mengetahui bahwa jika suatu institusi mengalami defisit bukan berarti organisasi tersebut mengalami kekurangan uang (*crash shortage*), tetapi defisit dapat direncanakan dalam rangka investasi untuk mengambil keuntungan dengan melakukan pinjaman.

Tujuan pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, antara lain: (a) untuk menutupi kebutuhan dana jangka pendek; (b) untuk membiayai kekurangan dana anggaran tahunan berupa biaya rutin dan beban hutang; (c) untuk membiayai investasi yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan daerah.

Kota Ambon merupakan daerah dengan potensi alam yang beragam, mulai daerah pantai, daerah dataran rendah, hingga daerah pegunungan dimana masih belum optimal dalam pemanfaatan dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber pembiayaan.

Untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah daerah Kota Ambon membutuhkan dana sebagai modal dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Secara faktual, pemerintah daerah mengalami kekurangan modal dan selama ini defisit tersebut diatasi oleh pemerintah pusat melalui sumbangan dan bantuan.

Perkembangan selanjutnya mengindikasikan bahwa pinjaman merupakan salah satu alternatif dalam membiayai defisit tersebut. Pinjaman daerah harus dilihat sebagai suatu langkah alternatif yang positif sebagai akumulasi modal. Selain akan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, pinjaman daerah diharapkan bisa mendewasakan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran daerah yang lebih baik dan mandiri.

Karena pinjaman daerah membawa konsekuensi yaitu kewajiban untuk mengembalikan angsuran pokok pinjaman yang disertai dengan bunga, biaya administrasi serta denda, oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon harus berhati-hati apabila akan mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan keuangan pemerintah Kota Ambon?; seberapa besar kelayakan pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon?; dan bagaimana faktor-faktor makro ekonomi (jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) mempengaruhi pemerintah Kota Ambon dalam melakukan pinjaman daerah.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah mengetahui kemampuan keuangan dan batas maksimum kelayakan pinjaman yang dapat dilakukan pemerintah Kota Ambon serta mengidentifikasi faktor-faktor makro ekonomi (variabel jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) yang mempengaruhi pinjaman daerah. Target luaran dari hasil penelitian yang diharapkan adalah diperoleh informasi mengenai kemampuan keuangan dan rekomendasi optimalisasi peran pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Kota Ambon.

II. TINJAUAN PUSTAKA

a.) Otonomi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten/kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah.

Pada dasarnya tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi menurut Mardiasmo (2002) yaitu;

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu aspek dalam pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Menurut Mangkoesobroto (1999:1), dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan besar, yaitu:

1. Peranan Alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, yang terkait dengan alokasi barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta dan disebut dengan barang publik.
2. Peranan Distribusi, yakni peranan pemerintah dalam mengusahakan agar pendapatan didistribusikan relatif secara merata kepada masyarakat. Dapat ditempuh melalui: (a) secara langsung melalui pajak progresif yang disertai dengan subsidi kepada masyarakat miskin; (b) secara tidak langsung melalui kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya dengan memberikan subsidi pupuk bagi petani.
3. Peranan Stabilisasi, yakni peranan ini terkait dengan peranan pemerintah dalam perekonomian secara makro misalnya dalam mengendalikan inflasi.

Fungsi distribusi dan stabilisasi akan lebih efektif bila dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi akan lebih efisien bila dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bila fungsi alokasi diserahkan kepada pemerintah pusat, maka akan banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak tepat sasaran. Bandingkan bila fungsi tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, proyek-proyek pembangunan akan lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan yang tegas dan jelas dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pada era otonomi, daerah diarahkan untuk berusaha menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Semakin besar keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan wilayahnya. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sebagai sumber utama pendapatan daerah.

Menurut Kitchen (1997:109), deficit anggaran merupakan hal umum yang dihadapi oleh pemerintah manapun. Dikalangan negara berkembang, pemerintah cenderung mengasumsikan bahwa peranan kunci dalam proses pembangunan sebagian besar dibiayai melalui pembangunan proyek-proyek. Defisit anggaran tersebut dapat diatasi dengan pinjaman pemerintah dalam jangka panjang maupun jangka pendek, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Sejalan dengan Kitchen, Todaro (1997:105) menyatakan bahwa terdapat 3 faktor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Menurutnya, akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal sumberdaya. Akumulasi modal tersebut terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar output atau income dikemudian hari. Pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif karena akan menambah jumlah produktifitas. Sedangkan kemajuan teknologi dianggap sebagian besar ekonom sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting karena dengan teknologi terdapat cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu kegiatan.

Untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana sebagai modal dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Secara faktual, pemerintah daerah mengalami kekurangan modal dan selama ini defisit tersebut diatasi oleh pemerintah pusat melalui sumbangan dan bantuan. Perkembangan selanjutnya mengindikasikan bahwa pinjaman merupakan salah satu alternatif dalam membiayai defisit tersebut. Pinjaman daerah harus dilihat sebagai suatu langkah alternatif yang positif sebagai akumulasi modal. Selain akan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, pinjaman daerah diharapkan bisa mendewasakan pemerintah daerah untuk merencanakan anggaran daerah yang lebih baik dan mandiri.

Sumber Pembiayaan Keuangan Daerah

Pembiayaan keuangan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pembiayaan, penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dan DPRD dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas; Pajak daerah, Retribusi daerah, BUMD, Pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah.
- 2) Dana Perimbangan, terdiri atas; Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus.
- 3) Pinjaman Daerah, terdiri atas; Pinjaman dalam negeri dan luar negeri.
- 4) Penerimaan Lain-lain yang sah

Definisi Pinjaman Daerah

Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pada masa yang akan datang, pinjaman daerah akan memegang peranan yang penting sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan daerah. Simanjuntak et. al (2000) menyatakan bahwa pinjaman daerah perlu dilakukan dengan tujuan:

- a. Pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah karena relatif terbatasnya penerimaan pemerintah daerah dan perusahaan daerah (BUMD).
- b. Pinjaman daerah dapat dimanfaatkan untuk membiayai sarana dan prasarana khususnya

proyek yang bisa menghasilkan (*cost recovery project*) karena kebutuhan akan sarana dan prasarana pembangunan di daerah cukup besar.

Menurut Pasal 49 UU No. 33 Tahun 2004: 1.) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional; 2.) Batas maksimal kumulatif pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak melebihi 60 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan; 3.) Menteri Keuangan menentukan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus untuk tahun berikutnya, dan; 4.) Pengendalian batas maksimal kumulatif pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pinjaman Daerah

Peraturan-peraturan yang mendasari dari implementasi pinjaman daerah terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, tentang pinjaman daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Menteri Negara Bappenas/Kepala Bappenas No. 005/M.PPN/06/2006, tentang tatacara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006, tentang pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pinjaman daerah;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006, tentang tatacara pemberian pinjaman daerah dari pemerintah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2006, tentang batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah, dan batas maksimum kumulatif pinjaman daerah.

Batas Maksimum Jumlah Pinjaman Daerah

Menurut PP No. 107 Tahun 2000 pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.) Pinjaman Jangka Pendek

Dalam melakukan pinjaman jangka panjang pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan.
2. Pinjaman jangka pendek dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya.
3. Pelunasan pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan.

b.) Pinjaman Jangka Panjang

Dalam melakukan pinjaman jangka panjang pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
2. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, DSCR paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Variabel Ekonomi Makro

Dalam kondisi riil ekonomi di suatu daerah, kebijakan pinjaman daerah dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara internal maupun eksternal sehingga hal ini memerlukan ketelitian yang tinggi dan prinsip kehati-hatian guna mempertimbangkan kebijakan pinjaman daerah sebagai instrumen sumber pembiayaan daerah.

Dalam penelitian ini, variabel ekonomi makro yang digunakan adalah tiga (3) yakni, variabel Jumlah Uang Beredar (JUB), tingkat Suku Bunga (i), dan tingkat Inflasi (Inf).

a.) Jumlah Uang Beredar (JUB)

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
- 2) Mudah dibawa-bawa
- 3) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
- 4) Tahan lama
- 5) Jumlahnya terbatas
- 6) Bendanya mempunyai mutu yang sama

Dalam ilmu ekonomi, peranan uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi:

- 1) Melancarkan kegiatan tukar menukar
- 2) Menjadi suatu nilai
- 3) Sebagai ukuran bayaran yang ditunda
- 4) Sebagai alat penyimpanan nilai

Di dalam pembahasan mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian, adalah penting untuk membedakan antara mata uang dalam peredaran dengan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral. Dengan kata lain, mata uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum (Sukirno,2000).

Adapun uang beredar dapat dibedakan menjadi:

- 1) Uang beredar dalam arti sempit (*narrow money*) atau M1, adalah uang kartal yang dipegang oleh masyarakat ditambah dengan uang giral. Secara umum, yang dimaksud dengan uang kartal adalah uang kertas dan uang logam dalam negeri yang berlaku dan dikeluarkan oleh Bank Sentral berdasarkan undang-undang. Sedangkan uang giral adalah simpanan dalam bentuk rekening uang (*demand deposit*) yang setiap saat dapat ditarik oleh pemiliknya guna ditukarkan dengan uang kartal sebesar nominal yang diinginkan oleh pemiliknya tanpa dikenakan denda. Dalam Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, uang giral terdiri atas

rekening koran dalam bentuk rupiah milik penduduk Indonesia, pengiriman uang serta deposito berjangka dan tabungan yang telah jatuh tempo.

- 2) Uang beredar dalam arti agak luas (*broad money*) atau M2, mencakup M1 ditambah dengan uang kuasi. Adapun uang kuasi adalah sesuatu yang mendekati ciri uang termasuk didalamnya adalah deposito dan tabungan yang akan dapat berfungsi sebagai media transaksi jika ia terlebih dahulu dikonversikan ke dalam uang kartal atau uang giral. Uang kuasi tidak dapat digunakan setiap saat dalam pembayaran karena adanya keterkaitan waktu. Dalam sistem moneter Indonesia, M2 disebut juga sebagai likuiditas perekonomian (Sukirno, 2000).

b.) Suku Bunga (*Interest*)

Suku bunga merupakan salah satu instrumen moneter yang dapat mempengaruhi atau memotivasi masyarakat maupun pengusaha untuk menabung atau berinvestasi. Dalam setiap perekonomian, tidak semua keuntungan yang dihasilkan suatu perusahaan serta pendapatan masyarakat akan digunakan untuk konsumsi. Bagi perusahaan, untuk menjamin agar kegiatan produksinya tetap mengalami kemajuan dan dapat bersaing maka perusahaan perlu melakukan investasi. Sedangkan bagi masyarakat, guna mengantisipasi kebutuhan di masa datang maka sebagian pendapatannya akan disisihkan untuk menabung.

Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar untuk meminjam uang selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam presentase uang yang dipinjam. Misalnya, suku bunga 12 persen per tahun artinya bahwa peminjam harus membayar 12 rupiah per tahun untuk setiap 100 rupiah yang dipinjamnya.

Suku bunga adalah penerimaan (dalam rupiah) dari setiap rupiah yang dipinjamkan. Dalam kegiatan perbankan, suku bunga dibedakan atas:

- 1) Suku bunga atas pinjaman
- 2) Suku bunga atas kredit

Besarnya kedua suku bunga yang diberikan oleh bank disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan hukum ekonomi yang berlaku. Naik turunnya suku bunga yang ditawarkan sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menjalin hubungan dengan bank sebab suku bunga merupakan daya tarik bank untuk mendorong masyarakat menanamkan dananya di bank.

c.) Inflasi (*Inflation*)

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang dan jasa masyarakat secara umum dan terus menerus. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran dalam lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijakan pemerintah.

Sukirno (2000) membedakan inflasi berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkannya menjadi dua, yaitu:

- 1) Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) adalah inflasi yang terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang terwujud dalam pasaran. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode ini, permintaan masyarakat bertambah dengan cepat dan perusahaan-

perusahaan pada umumnya akan beroperasi dengan kapasitas maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan gejala kenaikan harga.

- 2) Inflasi desakan biaya (*demand push cost*) merupakan masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Petambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksinya.

Inflasi juga dapat disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat (*monetary inflation*), misalnya dengan cara percetakan uang baru, pengeluaran kembali uang lama sehingga jumlah uang beredar semakin banyak.

Perhitungan tingkat inflasi/deflasi di Indonesia dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$Inf = \frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100$$

Dimana:

Inf_n = Tingkat inflasi bulan ke-n

I_n = Indeks harga konsumen (IHK) bulan ke-n

I_{n-1} = Indeks harga konsumen (IHK) bulan ke (n-1)

Bila perubahan IHK positif maka terjadi inflasi. Sebaliknya, jika perubahan IHK negatif maka terjadi deflasi.

Sebagai suatu fenomena ekonomi, inflasi sering terjadi karena sensitif terhadap perubahan musim, arus distribusi, rumor, stabilitas politik dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inflasi pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sedangkan deflasi umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek dan pengaruhnya tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan inflasi.

Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka hipotesis yang dikembangkan adalah diduga bahwa jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap pinjaman daerah di Kota Ambon.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisa Data

Menghitung DSCR, ketentuan ini diatur dalam PP 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dapat melakukan pinjaman dengan syarat bahwa berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, DSCR paling sedikit 2,5.

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \geq 2,5$$

Keterangan:

DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah (PBB, BPHTB, SDA)

BW : Belanja Wajib/Rutin

P : Angsuran Pokok Pinjaman

B : Bunga Pinjaman

DAU : Dana Alokasi Umum

BL : Biaya Lainnya

Analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP), dalam melakukan pinjaman pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan-persyaratan, salah satunya jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya.

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

BMP = Jumlah Pinjaman Daerah ≤ 75 % Penerimaan Umum T.A. sebelumnya

Keterangan:

- BMP : Batas maksimum pinjaman
- Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah : Pinjaman lama + pinjaman baru
- Penerimaan Umum APBD : Seluruh penerimaan APBD tidak termasuk DAK, dana darurat, pinjaman lama dan lain-lain penerimaan.

Faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi pinjaman daerah di Kota Ambon akan di analisis dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS = Metode Kuadrat Terkecil Biasa) sehingga dengan metode ini akan dihasilkan estimator yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh eksternal yang dalam penelitian ini menggunakan variabel jumlah uang beredar (JUB), tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap pinjaman daerah. Dalam regresi linier berganda, peubah Y yang merupakan peubah tidak bebas besarnya tergantung dari peubah X atau peubah bebas.

Bentuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini ditransformasi dalam bentuk logaritma natural, sebagai berikut:

$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \epsilon$ (1)

Dimana:

- Y = Pinjaman Daerah
- X₁ = Jumlah Uang Beredar
- X₂ = Tingkat Suku Bunga
- X₃ = Tingkat Inflasi
- β₀ = Konstanta
- β₁, β₂, & β₃ = Slope / Intercept
- ε = Error Term

Keterangan operasional variabel:

- 1.) Pinjaman Daerah (Y), merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Variabel ini menjadi alternatif sumber pembiayaan pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana maupun kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (rupiah).
- 2.) Jumlah Uang Beredar (X1), merupakan uang kartal yang dipegang oleh masyarakat dan uang giral ditambah dengan uang kuasi (sesuatu yang mendekati ciri uang) yang dapat berguna bila dikonversikan ke dalam bentuk uang kartal dan giral. Dipilihnya variabel ini karena dapat memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian (rupiah).
- 3.) Tingkat Suku Bunga (X2), merupakan penerimaan (dalam rupiah) dari setiap rupiah yang dipinjamkan per tahun sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan. Dipilihnya variabel

ini karena dapat memberikan gambaran atas kebijakan pinjaman yang akan diambil (persen).

- 4.) Tingkat Inflasi (X3), merupakan kenaikan harga rata-rata secara umum selama satu periode atas periode sebelumnya. Dipilihnya variabel ini karena dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan alokasi pinjaman (persen).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adalah suatu konsekuensi logis bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan dukungan dana/pembiayaan dan sumberdaya lainnya. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Ambon berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, pertumbuhan rata-rata untuk pendapatan adalah sebesar 5,5 persen, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yakni sekitar 29 persen atau sebesar Rp 843,93 miliar. Sementara pertumbuhan belanja daerah rata-rata adalah sebesar 6,07 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sekitar 30 persen atau sebesar Rp 711,89 miliar. Perkembangan penerimaan total daerah dari berbagai sumber dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Total Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2007 – 2011 (miliaran rupiah)

Tahun	PAD	Bagian Daerah			Total Bagian Daerah	DAU	Sumbangan /Bantuan	Total Penerimaan Daerah
		PBB	BPHTB	SDA				
2007	80,61	49,73	20,08	17,29	87,09	458,99	22,02	735,81
2008	88,47	51,13	17,94	11,68	80,74	487,72	16,23	753,91
2009	90,66	54,82	18,95	19,56	93,32	507,83	11,49	796,63
2010	91,86	54,85	16,57	18,68	90,09	381,67	18,00	671,72
2011	92,33	56,93	20,05	23,92	100,90	549,25	23,24	866,64

Sumber: Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah, 2012

Penerimaan daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan total daerah Kota Ambon untuk masing-masing sumber penerimaan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011, PAD Kota Ambon sebesar Rp 92,33 miliar dan berkontribusi sekitar 10 persen terhadap total penerimaan daerah. Sumbangan terbesar dalam bagian daerah bersumber dari PBB yakni sekitar 56 persen terhadap bagian daerah dan 6,6 persen terhadap total penerimaan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,5 persen. Penerimaan total daerah terbesar bersumber dari DAU yang pada tahun 2011 sebesar Rp 549,26 miliar atau berkontribusi sekitar 63 persen terhadap total penerimaan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,5 persen dan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 43,9 persen. Pertumbuhan total penerimaan terbesar pada tahun 2011 yakni sebesar 29,01 persen.

Kontribusi terbesar dalam total penerimaan daerah berasal dari transfer pemerintah pusat yakni dana alokasi umum, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi

Dana yang diperoleh pemerintah daerah adalah dana yang didapat untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan karena berbagai kegiatan pemerintah daerah. Besarnya belanja wajib untuk pemerintah daerah Kota Ambon seperti yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Belanja Wajib Pemerintah Daerah Kota Ambon
Tahun 2007 – 2011 (miliaran rupiah)

Tahun	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	Belanja Wajib
2007	286,73	303,07	589,79
2008	379,52	233,48	612,99
2009	410,89	239,51	650,41
2010	431,02	115,61	546,62
2011	524,52	169,37	711,89

Sumber: Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon, 2012

Pada tahun 2010 belanja wajib daerah Kota Ambon mengalami penurunan yang disebabkan karena berkurangnya dana transfer pemerintah pusat yakni dana alokasi umum. Pada tahun 2010 belanja rutin memberikan kontribusi terbesar yakni sekitar 78 persen hal ini disebabkan pada tahun tersebut kontribusi dari belanja pembangunan menurun sebesar 15 persen. Pada tahun 2011 kontribusi dari belanja rutin adalah sekitar 73 persen dengan pertumbuhan sebesar 21,70 persen atau sebesar Rp 524,5 miliar. Sementara belanja pembangunan berkontribusi sebesar 23,79 persen dengan pertumbuhan sebesar 46,51 persen atau Rp 161,3 miliar dan total belanja wajib pada tahun 2011 adalah sebesar Rp711,8 miliar.

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Ambon dalam Melakukan Pinjaman

Pinjaman daerah menjadi alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Karena pinjaman daerah menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya, besaran pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah.

Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ambon berapapun besarnya tidak menjadi masalah, asalkan pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membayar kembali. Dengan adanya kemampuan tersebut, maka di dalam pelaksanaannya pemerintah daerah tidak mendapat kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman. Tabel dibawah ini menggambarkan perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon dalam melakukan pinjaman.

Tabel 3. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon dlm Melakukan Pinjaman
Tahun 2007-2011 (miliaran rupiah)

Tahun	Total Penerimaan Daerah	Belanja Wajib	Dana Netto	Batas DSCR	Angsuran Pokok	DSCR	Klasifikasi Angsuran
-------	-------------------------	---------------	------------	------------	----------------	------	----------------------

2007	735,81	589,79	146,02	2,5	18,41	7,93	15-20 miliar
2008	753,91	612,99	140,92	2,5	19,07	7,39	15-20 miliar
2009	796,63	650,41	146,23	2,5	20,49	7,14	20-25 miliar
2010	671,72	546,62	125,10	2,5	18,04	6,93	15-20 miliar
2011	866,64	711,89	154,75	2,5	19,29	8,02	15-20 miliar

Sumber: Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon, 2012, diolah

Hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dana netto yang diperoleh pemerintah daerah Kota Ambon dari tahun 2007-2011 besarnya berfluktuasi, hal ini sangat dipengaruhi oleh total penerimaan daerah dan belanja wajib pemerintah daerah. Perolehan angka dana netto tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Ambon mampu untuk melakukan pinjaman. Dalam tabel terlihat bahwa pada tahun 2007-2011 nilai DSCR yang dimiliki pemerintah daerah Kota Ambon melebihi batas angka yang ditentukan dengan nilai rata-rata DSCR sebesar 7,48. Nilai DSCR terendah terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 6,93 karena pada tahun tersebut dana netto yang diperoleh menurun sebesar -14,4 persen sementara kewajiban untuk membayar angsuran mengalami penurunan yang tidak sebanding sebesar 11 persen. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan DSCR tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajiban membayar angsuran pinjaman yang telah dilakukan.

Batas Maksimum Pinjaman yang Diperbolehkan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas maksimum pinjaman pemerintah daerah Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 4. Batas Maksimum Pinjaman Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2007 – 2011 (miliaran rupiah)

Tahun	Total Penerimaan Daerah	Batas Pinjaman ($0,75 \times \text{APBD}_{t-1}$)	Jumlah Kumulatif Pinjaman Daerah Kota Ambon	Pinjaman Lama yang Belum Dibayar	Batas Maksimum Pinjaman
2006	691,67				
2007	735,82	0,75	518,76	35,77	482,98
2008	753,91	0,75	551,86	51,35	500,51
2009	796,63	0,75	565,43	43,89	521,55
2010	671,72	0,75	597,48	76,29	521,18
2011	866,64	0,75	503,79	64,15	439,65

Sumber: Bagian Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon, 2012, diolah

Batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ambon pada tahun 2011 adalah di bawah angka Rp 439.646,79. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon masih bisa memanfaatkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah, disamping memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, pemerintah daerah Kota Ambon juga mampu untuk melakukan pinjaman yang lebih besar lagi.

Variabel-variabel Makro Ekonomi yang Mempengaruhi Pinjaman Daerah

Sebelum dilakukan estimasi model, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data yang digunakan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal dengan menggunakan uji Jarque-Bera (*Jarque-Bera Test*). Hasil perhitungan dengan menggunakan *software* E-views. Hasil

uji normalitas data menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan berdistribusi normal hal ini dapat dilihat dari angka Jarque-Bera yang lebih kecil dari 2 atau dengan melihat nilai probabilitasnya yang lebih besar dari 5 persen.

Setelah diketahui data berdistribusi normal selanjutnya dilakukan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS), dengan hasil analisis yang diperoleh adalah seperti pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Berganda

<i>Dependent Variable: LNY</i>				
<i>Method: Least Squares</i>				
<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LNX1	4.598149	1.516495	4.602518	0.0247
LNX2	-3.109251	1.254637	-3.951729	0.0304
LNX3	0.936592	0.722041	1.866422	0.0735
C	7.457912	1.916322	8.714125	0.0059
<i>R-squared</i>	0.896393	<i>F-statistic</i>	87.31746	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.865573	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.003936	
<i>Durbin-Watson stat</i>	1.443225			

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil estimasi model yang dibangun pada tabel di atas, menunjukkan bahwa variabel makro ekonomi yang dimasukkan dalam model hanya X_1 dan X_2 yang memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien arah yang berbeda, dimana X_1 (jumlah uang beredar) signifikan dengan tingkat probabilitas 2,4 dan memiliki arah yang positif, sedangkan X_2 (tingkat suku bunga) signifikan dengan tingkat probabilitas 3,0 dan memiliki koefisien arah yang negatif. Sementara X_3 (tingkat inflasi) memiliki koefisien arah yang positif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pinjaman daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas, untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas digunakan uji *White*. Hasil uji *white* menunjukkan bahwa dalam model penelitian yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas terlihat dari angka probabilitas 28 persen $>$ 5 persen.

Uji Otokorelasi, untuk mendeteksi adanya otokorelasi adalah dengan menggunakan uji LM (*Lagrange Multiplier Test*). Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai probabilitas uji LM sebesar 7,8 persen $>$ 5 persen. Menunjukkan bahwa tidak terjadi otokorelasi.

Uji Multikolinearitas, untuk mendeteksi ada multikolinieritas digunakan *auxiliary regression*. Uji korelasi parsial menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas terlihat dari nilai R^2 pada model utama lebih besar dari R^2 parsial.

Uji Statistik

Uji statistik berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan, yaitu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien slope sama dengan nol maka dapat dikatakan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Uji t, bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dalam pengujian ini digunakan hipotesis:

$H_0 : b_i = 0$ artinya, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_a : b_i \neq 0$ artinya, ada pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya yaitu dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan t-tabel. apabila nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel, maka nilai t-hitung berada pada daerah penolakan H_0 sehingga keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima.

Pada $\alpha = 5$ persen diperoleh nilai t-tabel sebesar 2,920. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 8 di atas maka nilai t-hitung dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variabel	t-Hitung	Probabilitas	t-Tabel	Kesimpulan
$\ln X_1$	4.602518	0.0247	2,920	H_0 ditolak, signifikan pada $\alpha = 5\%$
$\ln X_2$	-3.951729	0.0304	2,920	H_0 ditolak, signifikan pada $\alpha = 5\%$
$\ln X_3$	1.866422	0.0735	2,920	H_0 diterima, tidak signifikan

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya variabel X_3 (tingkat inflasi) yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat (pinjaman daerah), sementara variabel X_1 (jumlah uang beredar) dan X_2 (tingkat suku bunga) berpengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah.

Uji F, bertujuan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini digunakan hipotesis:

$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_n = 0$ artinya, variabel bebas secara simultan tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat.

$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq \dots \neq b_n \neq 0$ artinya, variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung $>$ F-tabel maka kesimpulannya H_0 ditolak.

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F-hitung sebesar 87,317 sedangkan nilai F-tabel adalah sebesar 19,2. Karena nilai F-hitung $>$ F-tabel maka kesimpulannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, semua variabel bebas secara simultan signifikan mempengaruhi variabel terikat.

Uji Determinasi (*Goodness of Fit* $\rightarrow R^2$), digunakan untuk melihat kualitas model empiris. Hasil estimasi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,8963 artinya model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel terikat sebesar 89,63 persen dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas model yang digunakan adalah baik.

Analisis Ekonomi

Dari hasil estimasi diperoleh bentuk hubungan antara variabel bebas (jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi) dengan variabel terikat sebagai berikut:

$$\mathbf{LNY = 4.59 * LNX1 - 3.10 * LNX2 + 0.93 * LNX3 + 7.45 \dots\dots\dots(1)}$$

Berdasarkan persamaan yang dihasilkan dapat di analisis beberapa hal:

1. Nilai koefisien $\ln X_1$ (jumlah uang beredar) adalah sebesar 4,59 yang berarti bahwa setiap peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1 persen pada kondisi *ceteris paribus* maka jumlah pinjaman daerah akan meningkat sebesar 4,59 persen.
2. Nilai koefisien $\ln X_2$ (tingkat suku bunga) adalah sebesar -3,10 yang berarti bahwa setiap peningkatan suku bunga sebesar 1 persen pada kondisi *ceteris paribus* maka jumlah pinjaman daerah akan menurun sebesar 3,10 persen.

3. Nilai koefisien $\ln X_3$ (tingkat inflasi) adalah sebesar 0,93 yang berarti bahwa setiap peningkatan inflasi sebesar 1 persen pada kondisi *ceteris paribus* maka jumlah pinjaman daerah akan meningkat sebesar 0,93 persen.

V. PENUTUP

a.) Kesimpulan

- 1) Pemerintah daerah Kota Ambon tahun anggaran 2007–2011 mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman daerah, ditunjukkan dengan nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) rata-rata per tahun sebesar 7,48. Nilai ini berada pada di atas batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5.
- 2) Hasil analisis Batas Maksimum Pinjaman (BMP) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon pada tahun anggaran 2007–2011 mampu untuk melakukan jumlah pinjaman yang lebih besar lagi bila dibandingkan dengan pinjaman yang sudah dilakukan.
- 3) Variabel makro ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap pinjaman daerah adalah variabel jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Jumlah uang beredar memiliki arah slope yang positif sementara tingkat suku bunga memiliki arah yang negatif terhadap pinjaman daerah. Sedangkan variabel tingkat inflasi tidak signifikan mempengaruhi pinjaman daerah.

b.) Saran

- 1) Meskipun pemerintah daerah Kota Ambon mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman, namun di dalam melakukan pinjaman masih diperlukan kajian lebih lanjut tentang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman tersebut, agar jumlah pinjaman yang diperoleh tidak memberatkan keuangan daerah.
- 2) Pemerintah daerah Kota Ambon diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber keuangan sesuai dengan keinginan daerah maka sumber dana pinjaman ini harus betul-betul digunakan untuk mempercepat proses pembangunan daerah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah sendiri.

REFERENSI

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Unit Penerbitan Dan Percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Darumurti, K.D dan Rauta, Umu, 2000, “Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok”, *Kritis*, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.
- Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, (2000), *Himpunan Peraturan Pemerintah Tahun 2000*, Depdagri, Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, (2007). *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Joestamadji, 2000, Pengaruh Pinjaman Daerah terhadap PDRB dan PDRB terhadap PAD di Kota Surabaya, *Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).
- Juli Lutfiati, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Melakukan Pinjaman Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kediri), *Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM*, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).

- Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta
- Republik Indonesia, 1999, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- _____, 1999, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- _____, 1999, Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
- _____, 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, Jakarta.